LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN
PEKAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
(6 APRIL – 24 APRIL 2026)
DI PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG KELAS II
TAHUN 2026

PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PEKAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI ZONA INTEGRITAS DI PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Disahkan di Padang Panjang
Pada Hari Jumat, 24 April 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI
PADANG PANJANG

PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.,MH
NIP. 198510252007042001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, setiap instansi pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan melakukan Survei Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, yang menyatakan bahwa bagi setiap satuan kerja yang akan diusulkan pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBK/WBBM wajib melaksanakan survei mandiri yang terdiri atas Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1115/DJU/OT1.6./IV/2024 perihal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas.

Dalam rangka menghitung indeks persepsi anti korupsi terhadap pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Pengadilan Negeri Padang Panjang melakukan survei kepada pengguna layanan terhadap pelayanan yang telah diberikan. Responden dapat mengisi e-Survei persepsi Anti Korupsi (SPAK) terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Padang Panjang melalui aplikasi Survei Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui link e-survei :

https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/400188

yang telah disediakan dengan didampingi oleh petugas survey.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padang Panjang, 27 April 2026

Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang

PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.,MH

NIP. 198510252007042001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....3
BAB 1 KUESIONER SURVEI.....5
BAB II METODOOGI SURVEI.....7
A. Kriteria Responden.....7
B. Metode Pencacahan.....7
C. Metode Pengolahan Data dan Analisa.....7
BAB III PENGOLAHAN SURVEI.....9
A. Analisis Hasil Survei 9
B. Tindak Lanjut Hasil Survei..... 13
BAB IV DATA SURVEI.....15
A. Data Responden.....15
B. Data Pendukung Lainnya..... 16

BAB 1
KUESIONER SURVEI

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Zona Intrgritas pada Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas II dilakukan dengan mengunakan Aplikasi SISUPER dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2026 – 24 April 2026 dan diperoleh sebanyak 40 (empat puluh) orang responden.

Kuesioner pada Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik memuat pertanyaan sebagai berikut:

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, pertanyaan ini disampaikan untuk mengetahul apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya).

2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, pertanyaan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.

3. Tidak ada permintaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, pertanyaan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parsel, perhiasan, elektronik,

pakaian, bahan pangan, dil diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.

4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamuflasekan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih", dsb).

5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).

BAB II
METODOOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana datanya berupa angka angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistic deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap.

Populasi Survei Penelitian ini adalah semua masyarakat penguna layanan di Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas II antara lain: Pencari Keadilan, Polisi, Jaksa, Pengacara, Mahasiswa, dll. Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik simple random sampling.

B. Metode Pencacahan

Data pada penelitian ini diambil dengan instrument berupa kuesioner dengan mengisi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada computer touchscreen yang terletak di lobi PTSP Pengadilan Negeri Padang Panjang atau mengisi pada perangkat Smartphone atau Komputer dengan alamat: https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/400188. Kuesioner terlampir.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisa

Analisis data pada pengukuran Indek Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas II ini digunakan analisis statistic deskriptif.

Kelima ruang lingkup tersebut diatas, selanjutnya disusun dalam kuesioner dengan 5 item, dengan empat option jawaban, Adapun selanjutnya mengkonversi dengan skor 1 sampai 4. Analisis selanjutnya mengkonversi kedalam skala 100 dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas II ditentukan sebagai berikut:

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	88,31 – 100,0	3,532 – 4,000
2.	B (Baik)	76,61 – 88,30	3, 064 – 3,532
3.	C (Kurang Baik)	65,00 – 76,60	2,600 – 3,064
4.	D (Tidak Baik)	25,00 - 64,99	1,000 – 2,599

BAB III
PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

Dari data Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang diambil dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas II dengan alamat: https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/400188, diperoleh data sebanyak 40 (empat puluh) responden yang mengisi survei pada aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas II sebesar 3,98 (tiga koma sembilan delapan)/ 99,50 (Sembilan puluh sembilan koma lima puluh persen) berada pada kategori "Sangat Baik" (pada interval 88,31 s/d 100).

Berdasarkan Hasil Pekan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Padang Panjang dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Survei Persepsi Kualitas Pelayanan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah sebesar 3,98/99,50%. Adapun rincian masing-masing penilaian per unsur dapat di lihat pada data di bawah ini:

1. Diskriminasi Pelayanan

   Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Indikator Diskriminasi Pelayanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3.975, dapat diartikan bahwa pengadilan tidak melakukan diskriminasi pelayanan kepada pengguna layanan.

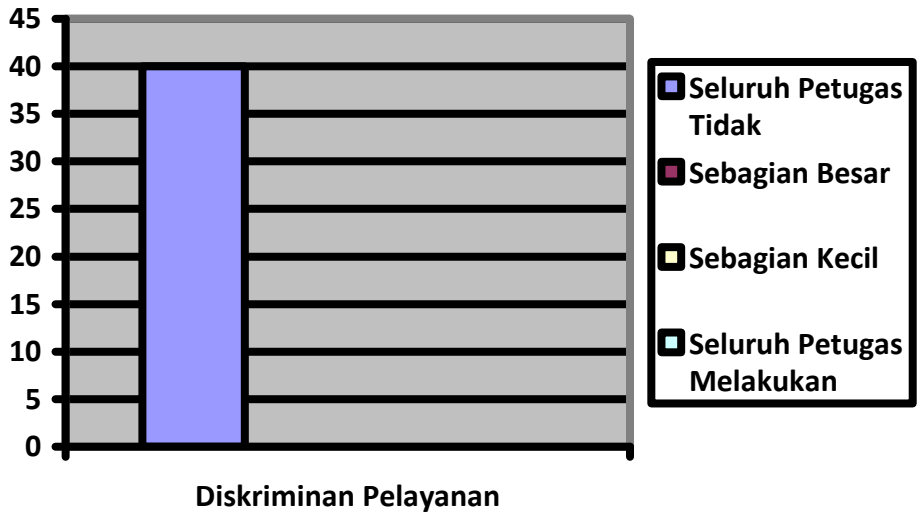

2. Pelayanan Diluar Prosedur

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Indikator Pelayanan Diluar Prosedur ini menunjukkan hasil pada indeks 3.975 dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan dalam memberikan Pelayanan dominan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

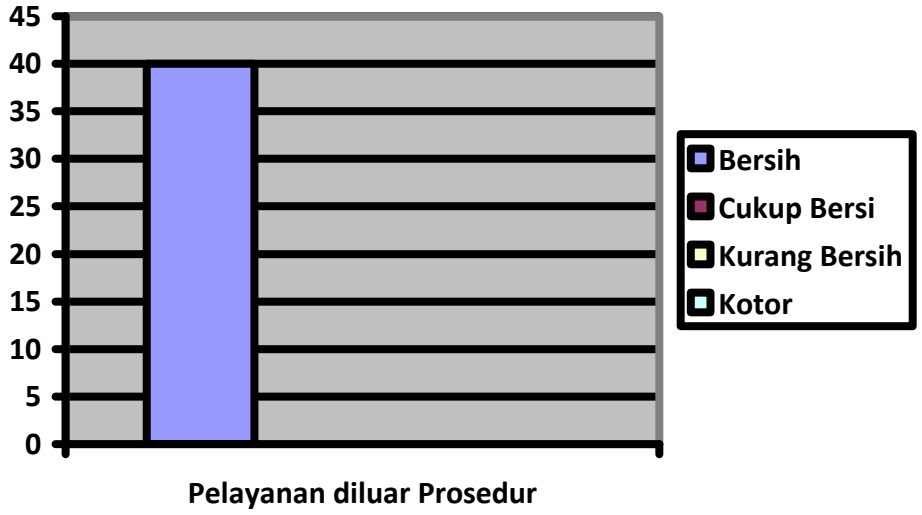

3. Penerimaan Gratifikasi

Prosedur Layanan ini menunjukkan hasil 3.975 dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan sangat baik dalam

memberikan prosedur layanan yang mudah diikuti oleh pengguna layanan.

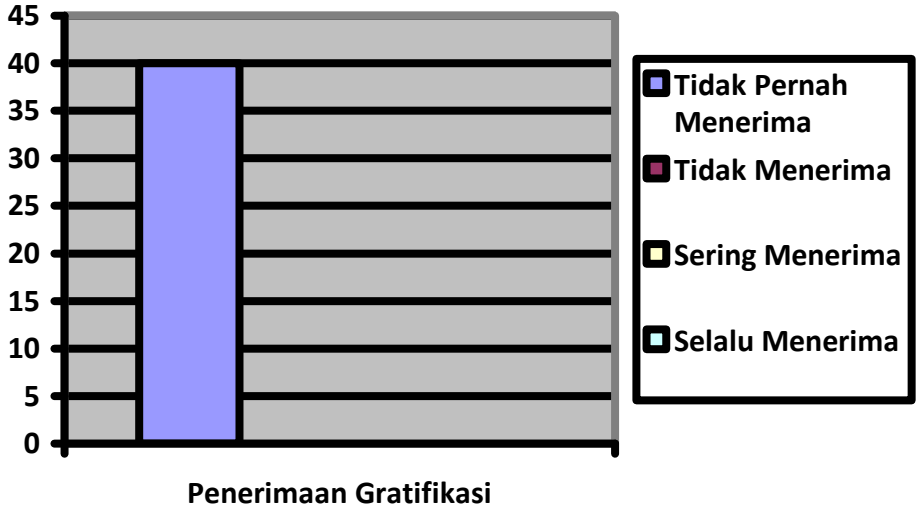

4. Pungutan Liar

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Indikator Pungutan Liar menunjukkan hasil pada indeks 4,000 (Bersih) diartikan bahwa kineria Pengadilan dalam memberikan pelayanan tidak melakukan praktek pungutan liar.

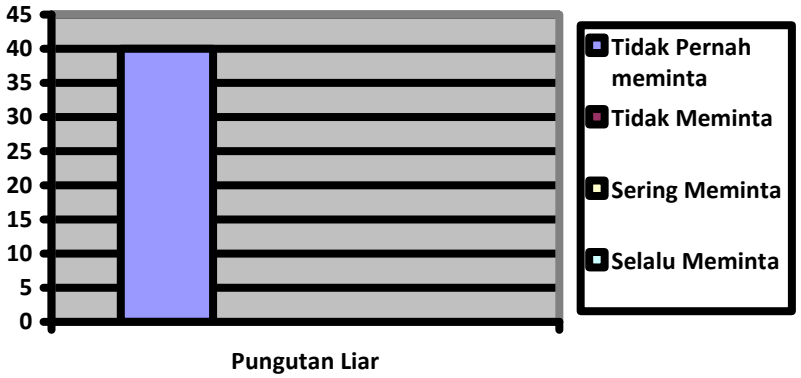

5. Praktek Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada lndikator Praktek Percaloan menunjukkan hasil pada indeks 3.975

dapat diartikan bahwa Pengadilan dalam memberikan pelayanan tidak melakukan praktek percaloan.

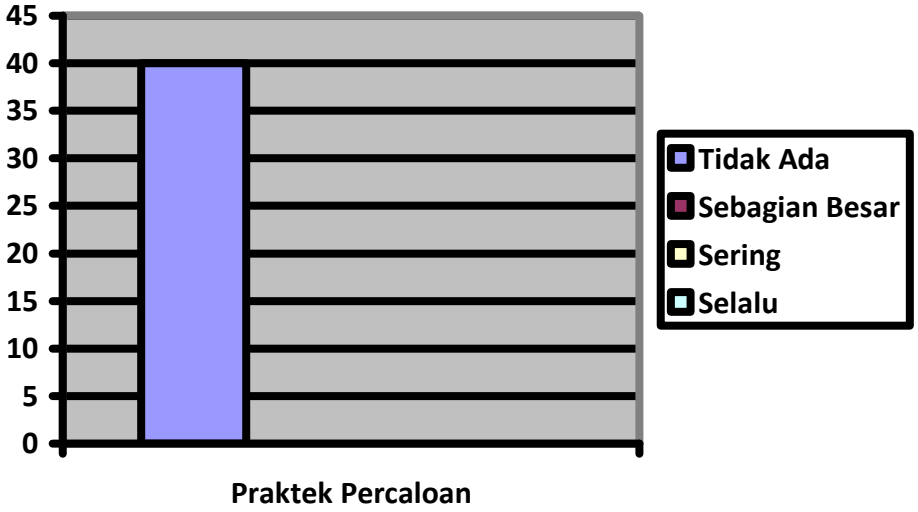

Setelah dilakukan kalkulasi terhadap 5 unsur, maka diperoleh nilai Indek Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sebesar 3,98. Dengan rincian rekap sebagai berikut:

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-Rata	Kategori
Q1	Diskriminasi Pelayanan	3.975	Sangat Baik
Q2	Pelayanan Diluar Prosedur	3.975	Sangat Baik
Q3	Penerimaan Gratifikasi	3.975	Sangat Baik
Q4	Pungutan Liar	4,000	Sangat Baik
Q5	Praktek Percaloan	3.975	Sangat Baik

Dari 5 unsur tersebut terdapat nilai rata-rata yaitu 3,98 yang mengambarkan kinerja Pelayanan Pengadilan Negeri Padang Panjang sangat Baik secara total nilai Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Padang Panjang sebesar 3,98 atau 99,50%, sehingga apabila pelayanan Pengadilan Negeri Padang Panjang masuk ke dalam kategori sangat baik.

NO	Nilai SPAK	Kategori
1.	**3,98/ 99,50%**	**Sangat Baik (A)**

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dengan Responden sebanyak 40 responden, terdapat 3 item terendah pada hasil survei tersebut, yaitu:

1. Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini ?

- Pengadilan Negeri Padang Panjang Memasang informasi dan himbauan secara jelas di area pelayanan terkait larangan penggunaan jasa perantara tidak resmi dan Melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh proses pelayanan untuk memastikan tidak adanya praktik percaloan.

2. Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?
   - Pengadilan Negeri Padang Panjang berkomitmen memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Setiap pengguna layanan dilayani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, golongan, maupun status sosial, sehingga tercipta pelayanan yang berintegritas dan berkeadilan.
3. Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?
   - Mensosialisasikan secara rutin kepada seluruh aparatur mengenai larangan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

BAB IV
DATA SURVEI

A. Data Responden

No	Responden	Demografi	Waktu
1	BUSTAMIID: R-400188-ZI-IPAK-C454C1E31EHP : 083180525189	58 Th | Laki-lakiLayanan Pidana	10 April 2026
2	RIKOID: R-400188-ZI-IPAK-B6AA94577EHP : 089506727358	44 Th | Laki-lakiLayanan Pidana	16 April 2026
3	SYAFRITAID: R-400188-ZI-IPAK-A5A60FB28FHP : 089506727358	35 Th | PerempuanLayanan Pidana	9 April 2026
4	SYAIFULID: R-400188-ZI-IPAK-9189415D0BHP : 085271228398	46 Th | Laki-lakiLayanan Pidana	21 April 2026
5	MIRAWATIID: R-400188-ZI-IPAK-C41D1DAC73HP : 085271228398	35 Th | PerempuanLayanan Pidana	13 April 2026
6	Eko PID: R-400188-ZI-IPAK-9972D4242DHP : 081266597721	29 Th | Laki-lakiLayanan Pidana	21 April 2026
7	KACITID: R-400188-ZI-IPAK-A4B9CE0C81HP : 082288777123	50 Th | Laki-lakiLayanan Pidana	9 April 2026
8	SUMMANTOID: R-400188-ZI-IPAK-F54A3123AEHP : 0812632812005	63 Th | Laki-lakiLayanan Pidana	20 April 2026
9	Anggi AngrainiID: R-400188-ZI-IPAK-4D8E5B7B71HP : 082128889953	35 Th | PerempuanLayanan Pidana	7 April 2026
10	RITA NATALIAID: R-400188-ZI-IPAK-14215F81D0HP : 089529394693	44 Th | PerempuanLayanan Pidana	15 April 2026
11	NUSYIRWANID: R-400188-ZI-IPAK-0A530FD30BHP : 082283831613	55 Th | Laki-lakiLayanan Perdata	21 April 2026
12	ARNIALISID: R-400188-ZI-IPAK-ED298D340EHP : 081371003576	50 Th | PerempuanLayanan Administrasi Umum	14 April 2026
13	SITI RAHMAID: R-400188-ZI-IPAK-E4BC093CBBHP : 081261386642	38 Th | PerempuanLayanan Perdata	17 April 2026
14	Ayu Br SimarmataID: R-400188-ZI-IPAK-F457AD9951HP : 083809516363	36 Th | PerempuanLayanan Pidana	20 April 2026
15	RitaID: R-400188-ZI-IPAK-A92A544C9BHP : 089506727358	35 Th | PerempuanLayanan Pidana	23 April 2026
16	PajarID: R-400188-ZI-IPAK-681DCC6F89HP : 085282326311	23 Th | Laki-lakiLayanan Pidana	10 April 2026
17	Novicha HarisID: R-400188-ZI-IPAK-39530312BDHP : 082268095772	26 Th | PerempuanLayanan Hukum / Informasi	13 April 2026
18	ChesillD: R-400188-ZI-IPAK-7098F1E940HP : 082389506025	30 Th | PerempuanLayanan Hukum / Informasi	16 April 2026
19	NuryiswanID: R-400188-ZI-IPAK-7D135B0A9EHP : 082283831613	55 Th | Laki-lakiLayanan Perdata	8 April 2026
20	FajrilD: R-400188-ZI-IPAK-405F9849CEHP : 083809516363	29 Th | Laki-lakiLayanan Administrasi Umum	20 April 2026
21	ArnialisID: R-400188-ZI-IPAK-EB68286607HP : 081371003576	50 Th | PerempuanLayanan Hukum / Informasi	24 April 2026
22	MELTIKA SAVIRAID: R-400188-ZI-IPAK-24586FC73EHP : 082171297179	30 Th | PerempuanLayanan Perdata	9 April 2026
23	FADHILAHID: R-400188-ZI-IPAK-9F7D8133DEHP : 081363990427	34 Th | PerempuanLayanan Pidana	24 April 2026
24	RatnawatiID: R-400188-ZI-IPAK-BCFF304886HP : 081267313471	53 Th | PerempuanLayanan Perdata	24 April 2026
25	RIYANID: R-400188-ZI-IPAK-A3A50E957DHP : 081363188959	38 Th | Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	24 April 2026
26	Zulfahri ID: R-400188-ZI-IPAK-75DC82C406HP : 081363188959	51 Th | Laki-lakiLayanan Perdata	24 April 2026
27	ESDI SIMAMORAID: R-400188-ZI-IPAK-583B6FE228HP : 082384170139	38 Th | Laki-lakiLayanan Perdata	24 April 2026
28	Soibah HarahapID: R-400188-ZI-IPAK-5422613336HP : 81378217344	31 Th | PerempuanLayanan Pidana	24 April 2026
29	Melly AlfianitaID: R-400188-ZI-IPAK-ABE6FE1BFFHP : 082168494443	31 Th | PerempuanLayanan Pidana	24 April 2026
30	Jhon HendrilD: R-400188-ZI-IPAK-DF4D801383HP : 081266125559	38 Th | Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	24 April 2026
31	RodjalD: R-400188-ZI-IPAK-5F3FE3B16CHP : 082283173639	33 Th | Laki-lakiLayanan Pidana	23 April 2026
32	YulinarID: R-400188-ZI-IPAK-40CB630568HP : 82283173639	49 Th | PerempuanLayanan Perdata	23 April 2026
33	NadiaID: R-400188-ZI-IPAK-554FC9382FHP : 083174090783	27 Th | PerempuanLayanan Pidana	23 April 2026
34	SesiliaID: R-400188-ZI-IPAK-FD7D4960F2HP : 089526172818	26 Th | PerempuanLayanan Hukum / Informasi	23 April 2026
35	HerulD: R-400188-ZI-IPAK-579D660B9EHP : 82284978892	35 Th | Laki-lakiLayanan Perdata	23 April 2026
36	HilwatyID: R-400188-ZI-IPAK-03C557CF7EHP : 085263394335	40 Th | PerempuanLayanan Pidana	23 April 2026
37	Rahmat GafardaID: R-400188-ZI-IPAK-F340F149A0HP : 082283002957	32 Th | Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	23 April 2026
38	Rahmat GafardaID: R-400188-ZI-IPAK-B352691050HP : 082283002957	32 Th | Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	23 April 2026
39	DwinaID: R-400188-ZI-IPAK-83795172EAHP : 08217154714	26 Th | PerempuanLayanan Pidana	23 April 2026
40	Jason PardedeID: R-400188-ZI-IPAK-E935BBF73CHP : 83898485631	30 Th | Laki-lakiLayanan Perdata	23 April 2026

B. Data Pendukung Lainnya

Screenshoot Aplikasi SISUPER BADILUM Untuk mengisi Indeks Survei Anti Korupsi (SPAK) Dengan alamat https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/400188

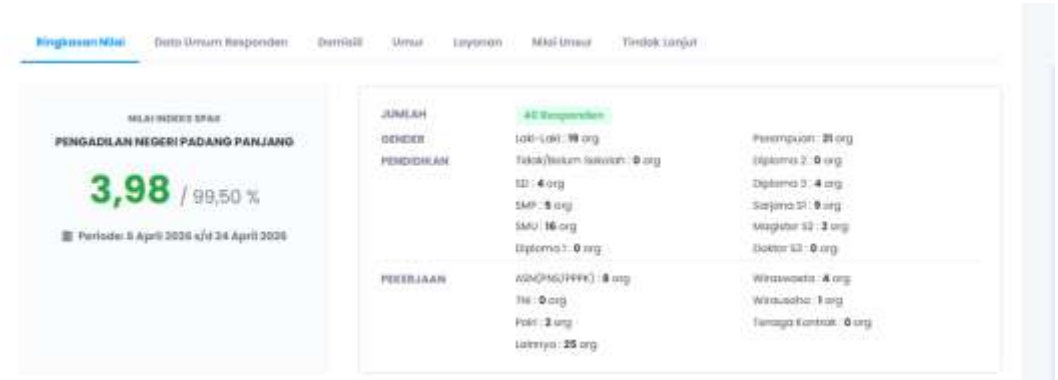

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
Jalan Soekarno Hatta No. 7 Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat Telp/fax: (0752) 82208,
Kode Pos: 27115 Website: http://pn-padangpanjang.go.id/ email: pnpp_kls2@yahoo.co.id

Padang Panjang, 27 April 2026

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Undangan Rapat Monev & Tindak Lanjut SPKP & SPAK Pekan Survei April 2026

Kepada Yth

Tim Survei SPKP & SPKP

di-
Tempat

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public secara berkelanjutan pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, untuk itu kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/I pada:

Hari / Tanggal	:	Selasa/ 28 April 2026
Pukul	:	09.00 WIB s.d selesai
Acara	:	Rapat Monev & Tindak Lanjut SPKP & SPAK
Tempat	:	Ruang Kepaniteraan Hukum

Demikianlah undangan dibuat dan kepada Bapak/ibu/sdr/I untuk mengikuti acara tersebut.

Atas kehadiran Bapak/ibu/sdr/i, kami ucapkan terimakasih.

Ketua Pelaksana,

RAHMANTO ATTAHYAT, S.H

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
Jalan Soekarno Hatta No. 7 Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat Telp/fax: (0752) 82208,
Kode Pos: 27115 Website: http://pn-padangpanjang.go.id/ email: pnpp_kls2@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 28 April 2026
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Kegiatan : Rapat Monev & Tindak Lanjut SPKP & SPAK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rahmanto Attahyat , S.H	Ketua Tim	
2.	Rini Fitri, S.H	Wakil Ketua Tim	
3.	Latifah Rahadatul Rahman	Sekretaris	
4.	Silvi Nirmalasari, S.H	Anggota	
5.	Junaidi Hendri, S.H	Anggota	
6.	Hardi Niko Pasmana, S.H	Anggota	
7.	Fitri Antonia Manik, S.H	Anggota	
8.	Yogi Andhika, S,H	Anggota	

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
Jalan Soekarno Hatta No. 7 Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat Telp/fax: (0752) 82208,
Kode Pos: 27115 Website: http://pn-padangpanjang.go.id/ email: pnpp_kls2@yahoo.co.id

NOTULEN

RAPAT MONEV SPKP & SPAK PERIODE 6 APRIL- 24 APRIL TAHUN 2026

PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG KELAS II

Hari/Tanggal	:	Selasa / 28 April 2026
Jam	:	09.00 WIB s/d selesai
Tempat	:	Ruang Kepaniteraan Hukum
Pimpinan Rapat	:	Rahmanto Attahyat, S.H. (Ketua Pelaksana Tim Survei SPKP & SPAK)
Notulis	:	Latifah Rahadatul Rahman, A.Md.M
Peserta	:	Tim Pelaksana SPKP dan SPAK

A. PENGARAHAN KETUA TIM

Rapat diawali dengan pembukaan oleh Ketua Pelaksana Tim Survei SPKP & SPAK kemudian dilanjutkan menyampaikan secara umum nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pada Pengadilan Negeri Padang Panjang baik sampai dengan saat ini. Nilai Indeks Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) yaitu 3,98 / 99,59 % dan nilai Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yaitu 3,98 / 99,50% Yang mana hal ini menandakan para aparatur telah memberikan pelayanan bersih, transparan dan akuntabel. Pada kesempatan tersebut dipaparkan nilai tiap indikator. Pada periode ini, semua indikator penilaiannya sudah baik dan untuk selanjutnya dihimbau untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja sehingga pelayanan aparatur Pengadilan Negeri Padang Panjang makin prima dan makin paripurna dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. PEMBAHASAN MONITORING DAN EVALUASI DAN USULAN TINDAK LANJUT SPAK DAN SPKP

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Presepsi anti Korupsi, dengan Responden masing- masing sebanyak 40 dan 46 responden, terdapat 3 item terendah pada hasil survei tersebut, yaitu:

Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) :

1. Apakah informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik (website, tulisan berjalan dll) maupun non elektronik (brosur, banner, poster dll) ?
2. Apakah petugas yang memberikan pelayanan pada pengadilan ini sangat membantu keperluan Bapak/Ibu dengan sigap ?
3. Apakah prosedur/alur proses pelayanan yang ditetapkan pengadilan mudah untuk diikuti ?

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) :

1. Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini ?
2. Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?
3. Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?

Untuk itu perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

Tindak Lanjut Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP):

1. Apakah informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik (website, tulisan berjalan dll) maupun non elektronik (brosur, banner, poster dll) ?

- informasi pelayanan pada unit layanan ini telah tersedia secara lengkap melalui media elektronik seperti website dan media digital lainnya, serta media non elektronik seperti brosur, banner, dan poster. Informasi tersebut disajikan secara jelas dan mudah diakses guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan.

2. Apakah petugas yang memberikan pelayanan pada pengadilan ini sangat membantu keperluan Bapak/Ibu dengan sigap ?

➢ Pengadilan Negeri Padang Panjang selalu meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja petugas secara periodik untuk memastikan pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif.

3. Apakah prosedur/alur proses pelayanan yang ditetapkan pengadilan mudah untuk diikuti ?

➢ prosedur atau alur proses pelayanan yang ditetapkan oleh pengadilan mudah untuk diikuti. Setiap tahapan disusun secara sederhana, jelas, dan sistematis serta didukung dengan informasi yang transparan sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami dan mengakses layanan.

Tindak Lanjut Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) :

1. Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini ?
   - Pengadilan Negeri Padang Panjang Memasang informasi dan himbauan secara jelas di area pelayanan terkait larangan penggunaan jasa perantara tidak resmi dan Melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh proses pelayanan untuk memastikan tidak adanya praktik percaloan.

2. Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?
   - Pengadilan Negeri Padang Panjang berkomitmen memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Setiap pengguna layanan dilayani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, golongan, maupun status sosial, sehingga tercipta pelayanan yang berintegritas dan berkeadilan.
3. Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?

- Mensosialisasikan secara rutin kepada seluruh aparatur mengenai larangan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun

Mengetahui,
Ketua Pelaksana

RAHMANTO ATTAHYAT, S.H

Notulis,

LATIFAH RAHADATUL RAHMAN, A.Md.M

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
Jalan Soekarno Hatta No. 7 Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat Telp/fax: (0752) 82208,
Kode Pos: 27115 Website: http://pn-padangpanjang.go.id/ email: pnpp_kls2@yahoo.co.id

DOKUMENTASI
RAPAT MONEV SPKP DAN SPAK PERIODE APRIL TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG KELAS II

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
Jalan Soekarno Hatta No. 7 Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat Telp/fax: (0752) 82208,
Kode Pos: 27115 Website: http://pn-padangpanjang.go.id/ email: pnpp_kls2@yahoo.co.id